

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam pembuatan surat waris yang didalamnya memuat keterangan palsu oleh ahli waris. Untuk mengetahui kepastian hukum serta keabsahan surat keterangan waris yang didalamnya berisikan surat keterangan palsu, serta untuk mengetahui bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan akibat keterangan palsu yang dimuat dalam surat keterangan waris. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum Notaris terhadap surat keterangan waris yang berisikan keterangan palsu? dan Bagaimanakah kepastian hukum akta otentik yang berisikan keterangan palsu? Penelitian ini merupakan hukum normatif dan bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Jenis data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dengan kasus yang diteliti yang bersifat mengikat, bahan hukum primer adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL. Bahan hukum sekunder meliputi : (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (c) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dijadikan peneliti untuk memberikan penjelasan dan memperkuat argumentasi ilmiah dengan literasi pendapat ahli melalui buku-buku hukum yang disesuaikan dengan variable (Pokok Bahasan Penelitian), berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris, kedudukan surat keterangan waris sebagai akta otentik, dan informasi media massa atau media cetak. Bahwa koherensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban Notaris menyelidiki secara materil yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut. Berpotensi mendegradasi integritas Notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL sebagai contoh bahwa salah satu ahli waris terbukti secara sah dan menyakinkan memberikan keterangan palsu pada akta pernyataan waris No.33 tanggal 06 Februari 2017, Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.34, tanggal 06 Februari 2017, Surat Keterangan Waris No.01, tanggal 06 Februari 2017 yang ditandan tangani oleh Notaris Muhammad Firdaus, bahwa akta tersebut batal demi hukum atau kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Karena tidak mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

Kata Kunci : Notaris, Surat Keterangan Waris, Akta Otentik

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the legal protection of notaries in making inheritance letters which contain false statements by the heirs. To find out legal certainty and the validity of inheritance certificates which contain false certificates, as well as to know how to take steps to prevent and overcome the consequences of false information contained in inheritance certificates. The formulation of the problem is how is the Notary's legal protection against inheritance certificates containing false information? and What is the legal certainty of an authentic deed containing false information? This research is normative law and is descriptive in nature. This type of research is normative legal research, using normative case studies in the form of legal behavior products. Types of primary data and secondary data. Primary legal material is legal material in the form of statutory regulations, jurisprudence or court decisions with cases studied which are binding, primary legal material is Supreme Court Decision Number 57/PID/2020/PT BBL. Secondary legal materials include: (a) Civil Code, (b) Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, (c) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning provisions for implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. Tertiary legal materials are materials used by researchers to provide explanations and strengthen scientific arguments by reading expert opinions through legal books adapted to variables (Research Topics), relating to the authority of Notaries in making inheritance certificates, the position of inheritance certificates as deeds authentic, and mass media or print media information. That is in coherence with Supreme Court Jurisprudence in Supreme Court Decision Number 702 K/Sip/1973 which states that a Notary's function is only to record/write down what is desired and put forward by the parties who appear before the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate the material presented by the person appearing before the Notary. Potentially degrades the integrity of the Notary. Supreme Court Decision Number 57/PID/2020/PT BBL as an example that one of the heirs was legally and convincingly proven to have given false information in the deed of inheritance statement No.33 dated 06 February 2017, Deed of Transfer and Transfer of Rights No.34, dated 06 February 2017, Certificate of Inheritance No.01, dated 06 February 2017, signed by Notary Muhammad Firdaus, that the deed is null and void by law or has the power of proof as a private deed. Because it does not have the conditions determined by law.

Keywords: Notary, Inheritance Certificate, Authentic Deed